



KEMAJUAN PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

dalam mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Melalui
Kebijakan Satu Peta

Latar Belakang

- Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan dan pemantauan yang baik
- Data dan informasi (geospasial dan non-geospasial) sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perencanaan dan pemantauan dalam proses pembangunan berkelanjutan
- Saat ini, ICRAF dan WRI sedang membantu Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam mempersiapkan system informasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan data dan informasi

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Kebijakan satu peta memungkinkan terwujudnya alur pengelolaan lahan yang baik dengan menyediakan dan mengelola satu basis data yang dapat digunakan dalam berbagai tahapan pengelolaan bentang lahan



Konteks Kebijakan



PERPRES NO. 9 TAHUN 2016

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 (Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016)

Perpres No. 9/2016 memuat amanat-amanat berikut:



Kewajiban dan Mekanisme Penganggaran untuk Kebijakan Satu Peta



Struktur Organisasi, Tugas & Wewenang Kelembagaan KSP serta Mekanisme Kerja pada skala makro



Rencana Aksi yang disepakati dan dipatuhi oleh para pemangku kepentingan



Kegiatan Utama Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Kegiatan Utama Kebijakan Satu Peta



KOMPILASI

Proses pengumpulan Informasi Geospasial (IG) Tematik yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga saat ini



INTEGRASI

Proses penyelarasan IG Tematik, baik yang telah dimiliki oleh Kementerian/ Lembaga maupun yang baru dibuat, terhadap IG Dasar



SINKRONISASI

Proses penyelarasan antar IG Tematik, termasuk didalamnya penyelesaian konflik yang terjadi akibat tumpang tindih hasil Integrasi

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)

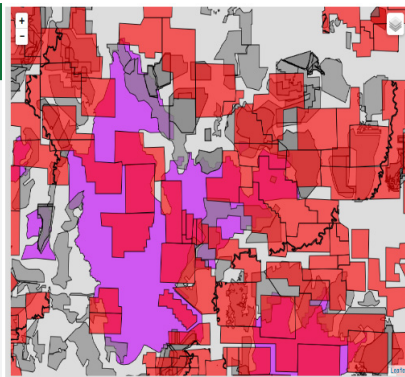
Tujuan: percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang mengacu pada **satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal**

Fungsi: a. acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor; dan b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.



Hasil yang diharapkan KSP

- Mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan dan batas daerah
- Mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur
- Mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perijinan yan terkait dengan pemanfaatan lahan
- Mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan serta keperluan pertahanan
- Meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktifitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha



Inisiatif Satu Peta Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kab. OKI



- Tidak semata bertujuan menghasilkan data peta, namun berupaya membangun proses multipihak yang inklusif untuk menghasilkan kesepakatan terkait pengelolaan bentang lahan
- Bertujuan untuk menghasilkan alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan
- Memiliki capaian dambaan yang diselaraskan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan
- Bertumpu pada kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalisasi dan melembagakan pendekatan Satu Peta dalam mekanisme pembangunan

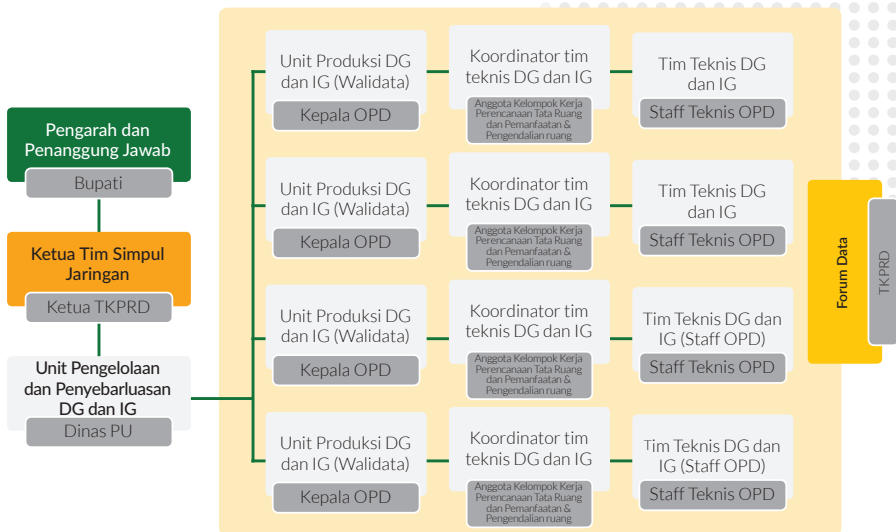


Pemerintah Kabupaten OKI telah mengeluarkan **Peraturan Bupati** terkait dengan **perubahan BKPRD menjadi TKPRD**, dimana salah satu **tugas dan fungsi** TKPRD adalah implementasi **Kebijakan Satu Peta (KSP)** dan **Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)** untuk penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan

- Telah terbentuk kelembagaan tim kerja implementasi KSP dan JIGD di bawah kelembagaan TKPRD
- Pembahasan mengenai **struktur dan proses kerja** yang mewakili setiap pelaku dalam membangun basis data geospasial secara kolaboratif
- Mendorong **penyusunan peta jalan kebijakan satu peta** untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan di tingkat Kabupaten OKI
- Menyusun dan mensosialisasikan **prosedur operasi standar** mengenai tugas dan fungsi masing-masing unsur di dalam kelembagaan KSP dan simpul jaringan
- Mengidentifikasi dan mengusulkan **bentuk insentif** bagi para anggota kelembagaan untuk meningkatkan motivasi kerja



Struktur Kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten OKI



Peran dan Fungsi Kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Kabupaten OKI

No	Unsur Pelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
1	Pengarah dan Penanggung jawab	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta
2	Ketua Tim Simpul Jaringan	Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JIGD yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan JIGD kepada Bupati
3	Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan DG & IG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Penyimpanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten OKI Pengamanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten OKI Verifikasi data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten OKI Penyebarluasan data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten OKI Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pengelolaan portal data simbangda Kabupaten OKI kepada ketua tim simpul jaringan; dan Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam pengelolaan portal data simbangda Kabupaten OKI
4	Unit Produksi DG & IG	Setiap OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten OKI	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan data geospasial yang akan dikelola dalam penyelenggaraan JIGD Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data geospasial di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan Menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan JIGD

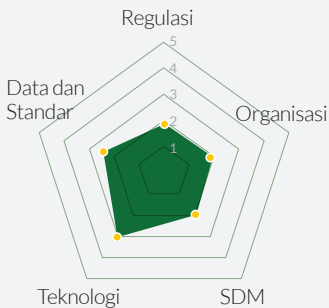
No	Unsur Pelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
		Unit Produksi DG & IG terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu:	
		1. Walidata, adalah Kepala OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan persetujuan penyebaran data geospasial dan menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring • Memutuskan klasifikasi aksesibilitas publikasi data geospasial yang dikelola sesuai ketentuan • Bertanggung jawab atas kualitas dan kesahihan data geospasial yang diproduksi pada masing-masing Unit Produksi
		2. Koordinator tim Teknis PD, adalah Anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan & Pengendalian ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data pada setiap Unit Produksi • Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada walidata
		3. Tim Teknis PD, adalah staf yang ditunjuk oleh walidata pada masing-masing PD	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data
5	Forum data	TKPRD Kabupaten OKI	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan diskusi antar pihak terkait integrasi dan penyelarasan data IGT hasil kompilasi terhadap data IGD dan memastikan kesesuaian antara data IGT dengan data IGD • Menyelenggarakan diskusi analisa tumpang tindih, identifikasi tipologi permasalahan data, dan diskusi penyelarasan antar data IGT yang saling berkaitan serta memastikan kesesuaian antar data IGT • Menyelenggarakan diskusi para pihak untuk merumuskan solusi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan data IGT hasil sinkronisasi
6	Pengguna DG & IG	Pemerintah dan publik yang memanfaatkan data yang dikelola di dalam Geoportal OKI	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan data yang dikelola di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Note: Peran dan fungsi diambil dari lampiran draft perbup baru yang berupa **Standar Operasional Prosedur**



- **Pelatihan dalam bidang teknologi informasi** terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan geoportal dan system informasi yang dibangun
- Pelatihan **sistem informasi geografis** untuk menunjang pengelolaan data geospasial
- Pelatihan **pengelolaan basis data** menggunakan tools/ alat bantu yang dibangun untuk melakukan proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi

Hasil Penilaian Pengembangan Kapasitas Kabupaten OKI



Pilar JIGD	Level	GAP
Regulasi	1.806	3.194
Organisasi	1.884	3.116
SDM	1.975	3.025
Teknologi	3.013	1.988
Data dan Standar	2.417	2.583

Peningkatan Kapasitas Teknis Pokja Kabupaten OKI

Pelatihan pengembangan Basis Data Geospasial untuk Implementasi Kebijakan Satu Peta di Kabupaten OKI:

- Pengenalan Konsep dasar Sistem Informasi Geografis
- Pelatihan penggunaan perangkat lunak *open source* QGIS untuk pengolahan data geospasial
- Pengenalan Geoportal Palapa (<http://49.0.2.22>)
- Pelatihan proses kompilasi: upload data, isi metadata, georeferensi dan topology data

Rencana penguatan kapasitas lanjutan:

- Penguatan kapasitas penggunaan Geoportal Palapa Kabupaten OKI
- Penguatan kapasitas kompilasi data geospasial
- Penguatan kapasitas integrasi data geospasial
- Penguatan kapasitas sinkronisasi data geospasial



- Melakukan instalasi Geoportal Palapa pada Server Kabupaten OKI
 - Geoportal Palapa Kab. OKI: <http://49.0.2.22>
- Pengembangan **alat bantu** untuk proses teknis kompilasi, integrasi dan sinkronisasi <http://49.0.2.22:3838/onemap/>
- Penyediaan **perangkat lunak tidak berbayar (open source)** untuk mempermudah proses pengelolaan data spasial

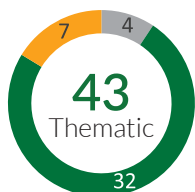


- Penyusunan daftar **katalog data** perencanaan penggunaan lahan serta informasi aksesibilitas pada tiap data
- Mendorong kelengkapan metadata dan standarisasi KUGI sesuai dengan standar nasional
- Merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) berbagi-pakai data sesuai dengan konteks Papua dan ketentuan serta aturan yang berlaku saat ini

Kondisi Ketersediaan dan Aksesibilitas Data Perencanaan Penggunaan Lahan Kabupaten OKI

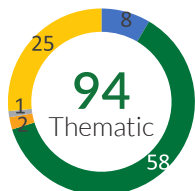
Ketersediaan data IGT

■ .jpg ■ .shp
■ Tabular

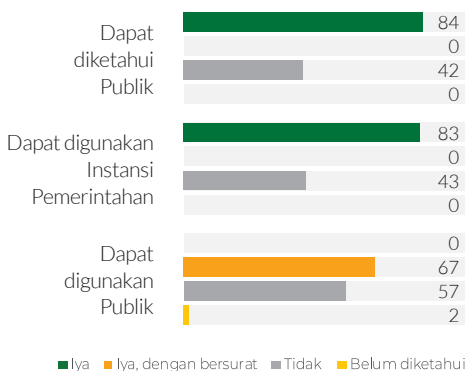


Ketersediaan data Perencanaan Penggunaan lahan

■ .jpg ■ .shp
■ .tif ■ Dokumen
■ Tabular



Jumlah data menurut tingkat aksesibilitas



Daftar Data Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)	No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
1	Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000	19	Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000
2	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE)	20	Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000
3	Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000	21	Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah skala 1:250.000
4	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	22	Peta RKPd skala 1:250.000
5	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	23	Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25.000
6	Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	24	Peta Batas Administrasi Kabupaten/ Kota skala 1:50.000
7	Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000	25	Peta Batas Administrasi Desa/ Kelurahan skala 1:10.000
8	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000	26	Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000
9	Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	27	Peta RTRWP Kawasan Strategis Provinsi skala 1:50.000
10	Peta Penutup Lahan skala 1: 50.000	28	Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000
11	Peta Izin Usaha Pertambangan (explorasi) skala 1:50.000	29	Peta Jalan Nasional skala 1:50.000
12	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	30	Peta Jalan Tol skala 1:50.000
13	Peta Jaringan listrik skala 1:50.000	31	Peta Jalan Provinsi skala 1:50.000
14	Peta sebaran lokasi gardu induk skala 1:50.000	32	Peta Jalan Kabupaten skala 1:50.000
15	Peta Geologi skala 1:100.000	33	Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000
16	Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000	34	Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000
17	Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 1:50.000	35	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000
18	Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 1:50.000	36	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000
		37	Peta Bagian RZWP3K skala 1:50.000

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
38	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten Skala 1:250:000
39	Peta Jenis dan Kekayaan tangkap di Kabupaten skala 1:250.000
40	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000
41	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000
42	Peta Sebaran Pelabuhan Penyebrangan skala 1:50.000
43	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000
44	Peta Jaringan Serat Optik, skala 1:50.000
45	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000
46	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50:000
47	Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000
48	Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000
49	Peta Sawah Beririgasi skala 1:5.000
50	Peta Lahan Sawah skala 1:50.000
51	Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan tanah skala 1:50.000
52	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
53	Peta Potensi Desa (sosial-ekonomi), minimal pada skala 1:50.000
54	Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000
55	Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000
56	Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan skala 1:50.000

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
57	Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan skala 1:50.000
58	Peta Persebaran Perkebunan skala 1:50.000
59	Peta PP RTRW Nasional skala 1:1.000.000
60	Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000
61	Peta Rencana Jaringan Rel dan Stasiun KA skala 1:50.000
62	Daftar Komoditas, Sebaran Areal, dan Produksi Pertanian
63	Jumlah Ketersediaan Pangan per Tahun
64	Daftar dan Sebaran Industri Pengolahan Hasil Pertanian
65	Daftar Komoditas, Sebaran Areal, dan Produksi Hortikultura
66	Daftar dan Sebaran Industri Pengolahan Hasil Hortikultura
67	Daftar dan Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
68	Daftar Kasus Wabah Hama Penyakit Tanaman
69	Daftar dan Sebaran Habitat Flora
70	Daftar dan Sebaran Lokasi Penangkaran Flora
71	Peta Batas Administrasi Kecamatan
72	Suhu Bulanan
73	Kelembaban Udara Bulanan
74	Curah Hujan Bulanan
75	Curah Hujan Harian
76	Sebaran Lokasi Stasiun Pengamatan Cuaca
77	Daftar dan Sebaran Industri Rumah Tangga
78	Daftar dan Sebaran Industri Mikro

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
79	Daftar dan Sebaran Industri Kecil Menengah
80	Daftar dan Sebaran Industri Besar
81	Daftar dan Sebaran Jenis Bangunan Pasar
82	Daftar Perusahaan dan Status Izin Usaha per Sektor
83	Daftar Kelompok Masyarakat, Areal Konsesi, dan Produksi Pemegang Izin Pengelolaan Hutan
84	Daftar Kelompok Masyarakat/ Perusahaan dan Produksi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu
85	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu per Jenis Komoditas
86	Jumlah Produksi Hasil Hutan Non Kayu per Jenis Komoditas
87	Daftar dan Sebaran Lokasi Obyek Wisata
88	Digital Elevation Model (DEM)
89	Garis Ketinggian/Kontur
90	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
91	Indeks Kualitas Lingkungan
92	Daftar dan Sebaran Lokasi Pencemaran Lingkungan
93	Daftar Kawasan Lindung
94	Daftar Kegiatan dan Sebaran Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
95	Citra satelit resolusi rendah (> 30 m)
96	Citra satelit resolusi sedang (5 - 30 m)
97	Citra satelit/foto udara resolusi tinggi (< 5 m)
98	Perubahan Penggunaan dan Tutupan Lahan
99	Jaringan Sungai Besar

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
100	Areal Sempadan Sungai
101	Daftar dan Sebaran Danau Alami
102	Sebaran Lokasi Ibukota Kabupaten
103	Sebaran Lokasi Ibukota Kecamatan
104	Sebaran Lokasi Kelurahan/Desa
105	Sebaran Pulau Besar dan Kecil
106	Daftar dan Sebaran Areal Kepemilikan Tanah Pertanian/ Perkebunan/Ladang
107	Kepadatan Penduduk
108	Pertumbuhan Penduduk
109	Daftar dan Sebaran Lokasi Jembatan
110	Peta Sebaran Permukiman
111	Peta Kawasan Strategis Kabupaten
112	Peta Lahan Kritis
113	Peta Kepadatan Penduduk
114	Peta Area Kebakaran Hutan dan Lahan
115	Peta Sebaran Hotspot
116	Peta HCV/NKT
117	Peta HCS
118	Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS)
119	Peta PIPPIB
120	Peta Potensi Konflik Lahan
121	Peta Kanal
122	Peta Kawasan Hidrologis Gambut
123	Peta Fungsi Ekosistem Gambut
124	Peta Konflik Batas
125	Sebaran Aset Daerah
126	Peta Kemiskinan

Rencana Tindak Lanjut

- Mendorong ujicoba implementasi SOP penyelenggaraan DG dan IG serta berbagi-pakai DG dan IG
- Penguatan kapasitas penggunaan Geoportal Palapa Kabupaten OKI
- Penguatan kapasitas kompilasi data geospasial
- Penguatan kapasitas integrasi data geospasial
- Penguatan kapasitas sinkronisasi data geospasial

Harapan

- Sistem pengelolaan data dan informasi yang komprehensif didukung dengan regulasi akan menghasilkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga bisa tersedia untuk perencanaan terpadu dan dapat digunakan sebagai media pemantauan pembangunan
- Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan satu peta di Kabupaten OKI

World Agroforestry (ICRAF) adalah lembaga penelitian internasional yang berpusat di Nairobi-Kenya, dibentuk tahun 1978 dengan nama The International Centre for Research in Agroforestry atau disingkat ICRAF. ICRAF merupakan satu dari 15 lembaga penelitian internasional yang tergabung dalam jaringan the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). ICRAF mengembangkan agroforestry berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipraktikkan petani. Melalui kegiatan penelitian dan kerjasama yang inovatif dengan berbagai mitra, kami mempersembahkan ilmu pengetahuan bagi petani dan pembuat kebijakan.

World Resources Institute (WRI) Indonesia

didirikan pada akhir 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global di Wasingthom D. C. WRI memiliki jaringan penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf dilebih dari 50 negara. Di Indonesia, kami telah mengerjakan proyek bersama para mitra selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat kemitraan formal, serta memperkuat penelitian lapangan.

Informasi lebih lanjut:

www.worldagroforestry.org
m.zulkarnain@cgiar.org



WRI INDONESIA